

Optimis WTP, Sampaikan LKPD Lebih Cepat

Palangka Raya— Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin optimistis Pemko Palangka Raya akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diserahkan kepada Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng Ade Iwan Ruswana di Kantor BPK Kalteng, kemarin.

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemprov Kalimantan Tengah lantaran berhasil meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut. Pada 2020 ini, Pemprov Kalteng kembali optimis akan raih WTP tersebut dan menargetkan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih cepat dari tahun sebelumnya.

Dalam jumpa persnya, Fairid mengatakan pihaknya akan siap dan segera menindaklanjuti rekomendasi ataupun catatan atas audit yang dilakukan lembaga vertikal tersebut. Terutama dalam ketepatan waktu tindaklanjut dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. “Ya kami akan berusaha untuk mempercepat apa yang diinginkan dari BPK ini, karena itu menjadi salah satu peningkatan ataupun keaktifan kewajiban dari pemko untuk menindaklanjutinya,” ujarnya, di ruang jumpa pers BPK RI, kemarin. Menurut dia, dengan percepatan tindaklanjut dari pemko atau audit tersebut, maka akan mempermudah pekerjaan sehingga tidak akan menumpuk diakhir tahun.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin mengatakan, optimis meraih WTP ini memang tidak lepas dari kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng. Lantaran, BKAD sifatnya menghimpun dan mengolah data secara keseluruhan yang telah disampaikan oleh perangkat daerah.

Diungkapkannya, tahun ini pihaknya memiliki target lebih cepat dari tahun sebelumnya dalam hal penyampaian LKPD ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalteng. Pasalnya, penyerahan LKPD ini ditargetkan pada 2 Maret mendatang ini.

“Seharusnya tiga bulan setelah anggaran berakhir maka LKPD harus sudah diserahkan kepada BPK, tahun lalu kami menyerahkan pada 14 Maret.” Dengan demikian, harapannya, saat BPK memberikan WTP pada paripurna dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 2020..

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Optimis WTP, Sampaikan LKPD Lebih Cepat*, Selasa, 28 Januari 2020.
2. <http://kaltengpos.co/>, *Optimis Pemko Dapat Raih WTP*, Selasa, 28 Januari 2020.

Catatan:

- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15/2004), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan

menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Selama empat kriteria ini dipenuhi, BPK akan memberikan opini WTP kepada pemerintah.

- Berdasarkan Pasal 17 UU No. 15/2004, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Peraturan Terkait

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

